

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Indonesia menjadi negara urutan kedua setelah Guatemala untuk keunggulan komparatif ekspor CPO terkuat yang dibuktikan dengan rerata nilai RCA sebesar 48,74 selama periode 2011 hingga 2021. Nilai RCA yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif relatif dalam memproduksi dan mengekspor produk CPO dibandingkan dengan negara-negara lain.
2. Indonesia memiliki hasil analisis EPD untuk sumbu X sebesar -0,0355940 dan sumbu Y sebesar -0,0000759, yang mana dalam kurun waktu 2012 sampai 2021 terhitung rata-rata Indonesia sedang mengalami kondisi retreat untuk ekspor CPO di pasar Internasional.
3. Diprediksi volume ekspor CPO Indonesia 22 tahun ke depan akan mengalami penurunan sebesar - 2,8 persen setiap tahunnya. Mulai dari 3.316.878 ton pada tahun 2023, sampai dengan 1.852.971 pada tahun 2044.
4. Variabel independen yang berpengaruh terhadap volume ekspor CPO Indonesia adalah volume ekspor CPO Indonesia di negara tujuan ekspor tahun sebelumnya (X_1), GDP negara tujuan ekspor (X_3), nilai tukar uang negara tujuan ekspor terhadap dolar (X_5), dan *dummy* kebijakan RED II (D_1).

5.2. Saran

1. Indonesia perlu memperbaiki infrastruktur logistik terutama jaringan transportasi darat maupun laut guna menjamin distribusi CPO secara tepat waktu ke negara tujuan ekspor dengan biaya yang efisien. Melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara tujuan ekspor untuk memperkuat hubungan dagang, mengeliminasi hambatan perdagangan, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk CPO Indonesia.
2. Indonesia perlu menerapkan monitoring dan evaluasi terkait kebijakan program peremajaan sawit rakyat (PSR) terutama realisasinya di tingkat petani. Kemudian menerapkan target produksi dan pendampingan. Melakukan riset terkait jenis sawit yang lebih baik dari yang ditanam periode sebelumnya, seperti Kolombia yang beralih menanam jenis sawit hibrida OxG.
3. Menolak kebijakan RED II dan diversifikasi pasar di luar Uni Eropa perlu dilakukan guna menghadapi ramalan volume ekspor CPO yang akan mengalami penurunan.

4. Volume ekspor CPO Indonesia di negara tujuan ekspor tahun sebelumnya bisa ditingkatkan dengan penggunaan tanaman sawit hybrid dengan produktivitas tinggi, menerapkan kebijakan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat), dan kebijakan yang mendukung peningkatan volume ekspor CPO.
5. GDP (*Gross Domestic Product*) negara tujuan ekspor yang meningkat akan menurunkan permintaan volume ekspor CPO, begitu pula sebaliknya. Karenanya Indonesia perlu melakukan penelitian terkait peramalan kondisi GDP negara tujuan ekspor di masa depan, sehingga kebijakan terkait ekspor CPO dapat disusun secara matang untuk menghadapi kenaikan atau penurunan GDP negara tujuan ekspor. Jika diramalkan terjadi penurunan, maka disusun kebijakan yang mendukung ekspor CPO seperti peningkatan rasio intensif pengali ekspor bagi produsen minyak goreng, pengurangan kuota *Domestic Market Obligation* (DMO), dan penurunan rasio pengali ekspor atas pemenuhan DMO. Namun jika diramalkan terjadi kenaikan, maka disusun kebijakan yang mendukung perusahaan sawit untuk mengamankan pasokan minyak sawit domestik seperti kebijakan pembekuan deposit ekspor CPO secara bertahap atau bahkan larangan ekspor.
6. Nilai tukar uang negara tujuan ekspor terhadap dolar yang mengalami penguatan akan meningkatkan permintaan volume ekspor CPO, begitu pula sebaliknya. Karenanya Indonesia perlu melakukan penelitian terkait peramalan kondisi nilai tukar uang negara tujuan ekspor di masa depan, sehingga kebijakan terkait ekspor CPO dapat disusun secara matang untuk menghadapi apresiasi atau depresiasi nilai tukar uang negara tujuan ekspor. Jika diramalkan terjadi apresiasi, maka disusun kebijakan yang mendukung ekspor CPO. Namun jika diramalkan terjadi depresiasi, maka disusun kebijakan yang mendukung perusahaan sawit untuk mengamankan pasokan minyak sawit domestik.
7. Indonesia perlu lebih memperdulikan penerapan skema sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dan RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) untuk menghadapi kebijakan RED II (*Renewable Energy Directive II*). Perluasan pasar ke negara di luar Uni Eropa penting dilakukan untuk mengantisipasi menurunnya permintaan Uni Eropa terhadap sawit.